

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai banyak pondok pesantren. Salah satunya yang terkenal adalah Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kehadiran pesantren mampu mempengaruhi dinamika sosial dan politik masyarakat. Kedekatan pesantren dengan masyarakat mempengaruhi corak budaya sehingga identik dengan Kebudayaan Islam Tradisional. Adapun Nasr mendefinisikan istilah tradisi yang digunakan oleh kaum tradisional yaitu untuk mengacu pada wahyu Allah beserta implementasinya dalam kehidupan historis manusia di lingkungan tertentu.

Terdapat tiga aspek penting dalam hal ini meliputi *al-din* yang berarti keseluruhan ilmu agama; *al-sunnah* yang berkembang mengikuti model-model sakral sehingga menjadi tradisi; serta *silsilah* yakni kesinambungan dalam tahap kehidupan dan pemikiran terhadap dunia tradisional kepada Yang Maha Awal.¹ Singkatnya definisi Nasr tentang tradisi mengandung makna implementatif berdasarkan prinsip yang terus menerus hadir dalam berbagai kondisi ruang dan waktu.

Nasr kemudian melanjutkan bahwasannya tiga aspek penting diatas melebur menjadi suatu budaya yang disebut sebagai Islam Tradisional. Kelompok Islam Tradisional melakukan penyerapan nilai-nilai lokal yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat bahwa suatu amalan dapat secara sah diambil dan diterapkan sejauh tidak bertentangan dengan syari'at. Keyakinan tersebut menjadi dasar dilakukannya berbagai tradisi lokal non-Islam ke dalam amalan muslim misalnya *slametan*, *ziarah*, dan berbagai praktik keagamaan lainnya.

Meskipun sebagian ulama tidak menyetujui hal ini, namun mereka yang menyetujui menganggapnya sebagai bentuk pengkayaan keimanan dan sebagai cara memudahkan penyebaran agama Islam. Adapun kelompok yang berbeda haluan dalam hal prinsip dan juga keyakinan ini disebut sebagai kaum modernis. Oleh

¹Seyyed Hossein Nasr, *Traditional Islam in the Modern World*, (New York: Columbia University Press, 1987), hlm. 13.

karena itu, terdapat dua tipologi yang membedakan tradisi antara Islam Tradisional dan modernis berdasarkan prinsip, mazhab, dan kebiasaan.

Kedua kelompok tersebut kemudian membentuk suatu perkumpulan masyarakat yang terorganisir yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Adapun organisasi ini menyebar ke berbagai daerah mulai dari perkotaan hingga pelosok desa. Akan tetapi, penyebarannya tidak melulu merata di seluruh daerah, melainkan terdapat wilayah tertentu yang didominasi baik oleh Muhammadiyah dan NU. Secara umum anggota Muhammadiyah lebih banyak tersebar di daerah perkotaan, sementara anggota NU cenderung dominan di wilayah pedesaan. Secara sporadis Kader NU banyak ditemukan di Jawa, terutama Jawa Timur dan Madura, sepanjang pantai utara Jawa Tengah, serta di wilayah Cirebon dan Banten, Jawa Barat.

Kabupaten Situbondo juga termasuk ke dalam kabupaten yang penduduknya dekat dengan budaya atau tradisi NU. Meskipun terdapat juga Organisasi Islam Muhammadiyah, namun pergerakannya tidak semasif NU. Kuatnya NU di Kabupaten Situbondo salah satunya disebabkan oleh pengaruh seorang kiai. Kiai adalah tokoh masyarakat sekaligus pengasuh pondok pesantren yang mempunyai kharisma untuk menarik dukungan dan simpati publik. Senada dengan pendapat Weber bahwa kepemimpinan kharismatik dapat membawa dampak positif bagi yang dipimpin sehingga dalam konteks hubungan kiai dan masyarakat sangat penting.² Hal tersebut juga diperkuat oleh semboyan “Situbondo Bumi Sholawat Nariyah” yang identik dengan aktivitas doa bersama seperti Organisasi Islam NU.

Sementara itu, pondok pesantren dalam hal ini menjadi tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan agama. Para penduduk umumnya banyak yang tertarik untuk memilih sebagai seorang santri karena figur dari kuatnya figur seorang kiai. Para santri ini nantinya telah dicetak untuk mengabdikan kepada masyarakat dengan bekal ilmu yang diperoleh. Contohnya seperti menjadi guru ngaji, berdakwah, membuat komunitas pengajian bahkan jika mampu santri dapat pula mendirikan pondok pesantren. Oleh karena itu, secara tidak langsung hal ini

² J. Rebiru, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, (Jakarta: CV. Pedomani Ilmu Jaya 1992), hlm. 5 Cet. IV

memperkokoh budaya Tradisionalisme Islam dan juga memperluas nama pondok pesantren di wilayah Tapal Kuda³ bahkan tersebar ke seluruh Indonesia.

Adapun dalam menyebarluaskan pengaruhnya, NU menerapkan prinsip dan ideologi yang tercermin melalui ketaatan organisasi ini pada Teologi Sunni. Lebih lanjut, Teologi Sunni berisi tentang cara pandang umat islam terhadap politik. Menurut Fealy, Teori Politik Sunni cenderung untuk mengutamakan kompromi daripada harus mengorbankan banyak pihak terutama dari kalangan muslim.⁴ Oleh karena itu, kedekatan NU dengan pemangku kekuasaan mulai terlihat bahkan sejak NU menjadi sebuah partai politik di tahun 1955-1967.⁵

Kesuksesan Organisasi Islam NU yang berhasil meraih suara terbanyak pada saat itu yaitu dengan cara mengimplementasikan Teori Politik Sunni untuk mempertahankan eksistensinya dalam sebuah konstelasi politik. Hal ini juga diperkuat oleh prinsip yang dipegang erat NU tentang konsep *maslahat* dan *amar ma'ruf nahi munkar* (secara harfiah berarti kebaikan dan manfaat). Oleh karena itu, pertalian antara teori politik Sunni dan kedua prinsip tersebut membawa NU menjadi Organisasi Islam yang mempunyai pengaruh besar di tingkat nasional.

Peran penting seorang kiai juga terlihat dalam struktur Organisasi NU. Dalam hal ini, struktur tersebut terbagi menjadi dua yaitu *Rais Am Syuriah* (Badan Keulamaan) dan *Tanfidziah* (Badan Eksekutif). Pertama, *Rais Am* merupakan suatu badan yang terdiri dari para ulama seperti kiai besar NU. Kedua, *Tanfidziah* atau badan eksekutif yang sebagian besar pengurusnya merupakan anggota muslim aktif dalam organisasi. Dalam hal ini Badan Syuriah diberi wewenang yang sangat besar

³ Asal mula penamaan tersebut karena bentuk kawasan yang menyerupai tapal kuda. Adapun dalam Bahasa Inggris wilayah ini dikenal dengan sebutan *The Eastern Salient* dan dalam Bahasa Belanda *De Oosthoek* yang berarti Pojok Timur. Daerahnya sendiri terdiri dari Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi (Pesantren Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong <https://www.pzhgenggong.or.id/2273/sejarah-tapalkuda/> diakses 12 Agustus 2022)

⁴ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hlm. 61.

⁵ Setelah keluar dari Masyumi, NU menjadi partai islam yang meraih suara terbesar setelah PNI dan PKI dengan meraih dukungan terbanyak terutama dari Jawa Timur khususnya Madura di era orde lama. (Greg Fealy, hlm. 203)

di bidang legislatif dan keagamaan, sementara Tanfidziah memegang peran administratif.

Berdasarkan fungsinya, maka antara ulama dan muslim awam juga berlaku dalam keanggotaan pada umumnya. Akan tetapi, terdapat hak-hak khusus bagi para ulama atau kiai. Oleh karena itu, kekuasaan dalam tubuh NU terkonsentrasi di tangan segelintir elit keluarga kiai yang mengendalikan pesantren besar, seperti Tebuireng, Tambakberas dan Denanyar di Jombang, Lirboyo di Kediri, Lasem dan Rembang di Jawa Tengah, dan Buntet di Jawa Barat. Secara statistik berdasarkan situs pangkalan data pondok pesantren yang dikelola oleh Kementerian Agama menyebutkan bahwa Situbondo memiliki 186 pondok pesantren. Total secara akumulatif pada tahun 2019 terdapat sekitar 37.765 santri mukim (tinggal di pondok) dan 7.321 santri yang tidak mukim.⁶ Fenomena tersebut membuat Kabupaten Situbondo berada di posisi lima besar jumlah santri terbanyak di Jawa Timur.

Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo menjadi pondok pesantren tertua di Situbondo yang dibangun oleh Kiai Syamsul Arifin pada tahun 1914. Lokasi pondok terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyuputih. Umumnya seorang kiai akan meneruskan tongkat kepemimpinan pondok pesantren kepada garis keturunannya yang sah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan *status quo* sebagai pengasuh pondok pesantren di masyarakat. Setelah Kiai Syamsul Arifin wafat, maka tongkat estafet dilanjutkan oleh anaknya bernama Kiai As'ad Syamsul Arifin. Pada tahun 1990 Kiai Fawaid meneruskan perjuangan dari ayahnya yakni Kiai As'ad untuk menjadi pengasuh pondok. Tepat tahun 2012 Kiai Ach. Zaim Ibrahimy atau yang dikenal Gus Zaim mendapat amanah untuk memimpin pondok sampai sekarang.

Adapun eksistensi Pesantren Salafiyah Syafi'iyah hingga saat ini adalah berkat kemampuan adaptasi dari pengasuh pondok untuk menjawab dinamika perubahan sosial politik yang terjadi. Keberhasilan pesantren tersebut ditunjukkan

⁶ Situs Kemeterian Agama tentang jumlah Pondok Pesantren di Seluruh Indonesia pada <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

oleh basis massa santri dan alumni yang jumlahnya kian meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2019 tercatat jumlah santri yang masuk sekitar empat ribu orang. Jika di total seluruh santri aktif di tahun tersebut yaitu sekitar 15 ribu orang. Basis massa inilah yang menjadi daya tarik bagi para elit politik untuk mendekati seorang kiai dalam rangka berkunjung meminta doa restu. Terutama menjelang pemilihan kepala daerah, kandidat yang maju umumnya mengharapkan supaya para pengikut kiai dapat satu barisan dengannya.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kiai membuka pintu selebar lebarnya bagi para kandidat yang maju. Dengan demikian hal tersebut mengisyaratkan adanya suatu perilaku yang demokratis sebagai upaya untuk menilai dan menyaring calon yang akan dipertimbangkan. Sebagaimana teologi sunni yang *luwes* dengan tujuan kemaslahatan umat serta stabilitas sosial politik, maka hal ini pun diterapkan oleh kiai dalam menentukan kandidat yang akan maju. Pada Pilkada 2020 di Situbondo penulis menemukan kecondongan tokoh elit pesantren yang termasuk bagian dari Partai PPP seperti Kiai Afif dan Nyi Juhariah untuk mendukung pasangan Karna-Khoirani.

Sebelum itu, keikutsertaan Kiai di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah untuk masuk ke Partai PPP pada dasarnya memang bertujuan untuk meneruskan jejak perjuangan dari Almarhum Kiai Fawaid. Politik dalam sudut pandang beliau adalah suatu alat untuk menyampaikan aspirasi berupa kebijakan tertentu yang mengedepankan nilai-nilai agama sehingga dapat bersentuhan langsung dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, kiai – layaknya warga negara pada umumnya – berhak untuk berpartisipasi dalam politik. Hal inilah yang kemudian menjadi percontohan para santri untuk meneruskan perjuangan beliau. Hampir sebagian besar santri yang berasal dari Situbondo dan ingin terjun ke politik praktis cenderung memilih partai yang dibesarkan oleh gurunya.

Adapun keluarga kiai ini bukan saja sekadar elit agama, melainkan merangkap juga sebagai elit sosial-ekonomi. Sebagian besar kiai aktif dalam pertanian dan bisnis. Dalam hal ini sumber kekuasaan kiai tidak hanya berasal dari kepercayaan masyarakat tetapi juga berasal dari sumberdaya yang sifatnya materiil. Kegiatan semacam itu memberikan pemasukan untuk mensubsidi penyelenggaraan

pesantren dan menghimpun modal bagi keluarga kiai untuk memberikan pengaruhnya kepada masyarakat. Dalam usahanya untuk mengendalikan aset ataupun statusnya, kiai mengandalkan hubungan keluarga dan jaringan patronase. Jaringan patronase ini dapat dibangun melalui tindakan dan simbol dari gaya kepemimpinan kiai yang mempribadi (*personalized*).⁷

Gaya kepemimpinannya sendiri tercermin dari keramahan serta sikapnya yang penuh perhatian, sementara modal ekonomi digunakan untuk memberi manfaat atau perlindungan kepada para pengikutnya. Dalam hal ini posisi kiai secara hirarkis berada di atas para pengikut sehingga hubungan ini sifatnya timpang. Seorang pengikut setia memperoleh manfaat seperti diungkap oleh Fealy, yaitu seorang kiai akan menempatkan anggota keluarga atau pengikutnya yang di percaya di posisi strategis dalam organisasi internal seperti NU atau eksternal seperti pemerintahan.⁸ Sehingga orang-orang kepercayaan kiai tersebut memperoleh keuntungan berupa jenjang karir dan manfaat lainnya.

Peran sentral kiai memperlihatkan adanya hubungan hirarkis antara kiai dan santri atau dengan pengikut setianya. Scott menyebut hubungan ini sebagai ikatan patron klien. Ikatan ini merupakan suatu pertukaran hubungan antar peran yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan sumber daya.⁹ Sementara itu, pertukaran adalah keuntungan atau manfaat yang diberikan kiai kepada pengikutnya. Sebaliknya pengikut dapat memberikan dukungan atau menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan kiai. Menurut Scott, apabila ikatan ini berlangsung secara terus menerus, maka kualitas hubungan pun semakin meningkat. Oleh karena itu, seseorang dengan latar belakang pondok pesantren biasanya mengandalkan jaringan kiai untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya.

Demikian halnya posisi kunci – pengusaha atau nonulama – baik di tingkat lokal maupun nasional selalu dilindungi setidaknya oleh kiai berpengalaman. Dalam keadaan seperti itu, umumnya terjadi tawar-menawar tak terucap antara

⁷ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hlm. 226

⁸ Ibid, hlm. 56.

⁹ James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* dalam *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (1972), hlm. 92.

patron dan klien yang menjamin keuntungan keduanya. Sang kiai mengandalkan kliennya untuk menyuarakan pandangan serta kepentingannya, sementara klien tergantung kepada kiai dalam hal otoritas serta keamanan karirnya. Oleh karena itu, dengan adanya ikatan patron klien membuat suatu relasi yang meminta adanya kesinambungan serta sinergi antara kiai dan elit sebagai pengikutnya.

Kendati kentalnya patronase, namun dalam beberapa kasus sempat terjadi perpecahan antar elit yang ada di pondok pesantren. Contohnya di masa orde baru (1966-1998) dalam tubuh NU mengalami perbedaan sudut pandang antara kiai senior terkait penyederhanaan partai di tahun 1973. Tak pelak perbedaan tersebut menimbulkan sebagian besar anggota NU keluar Partai PPP.¹⁰ Terlebih, tindakan represif pemerintah terhadap ormas dan partai politik mengakibatkan NU mau tidak mau terbagi menjadi dua kubu. antara Kubu Situbondo dan Kubu Cipete.¹¹ Pertama, Kubu Situbondo yang menginginkan bahwa syuriah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan NU perlu Kembali ke Khittah sebagai Gerakan *diniyah ijtima'iyah*. Kedua, Kubu Cipete memilih untuk menggelar Munas dengan menunjuk Cholid Mawardi sebagai ketua panitia.

Dualisme diatas merupakan bentuk kekecewaan NU karena posisinya yang semakin terdesak serta kurangnya pemberdayaan bagi warga jami'iyah di daerah dan pesantren-pesantren. Sebenarnya gerakan Kembali ke Khittah sudah mulai mencuat sejak 1959. Seperti yang disebut oleh Greg Fealy pada masa itu sebagai “gerakan pro-jami'iyah”.¹² Di sini para kiai senior berperan penting dalam hal menyelesaikan konflik internal organisasi. Oleh karena itu, keputusan NU untuk kembali ke Khittah pada saat muktamar tahun 1984 di Situbondo berhasil disahkan sehingga meredam polarisasi antara kubu Situbondo dan Cipete.

¹⁰ Sejak Djaelani Naro terpilih menjadi Ketua Umum PPP pada tahun 1980an, NU justru melihat bahwa posisinya sudah tidak lagi menguntungkan serta bergejolak. Hal ini juga dikuatkan dengan sosok ketua umum yang didukung oleh rezim Orde Baru untuk menggembosi partai Islam (<https://gusdurian.net/kisah-gus-dur-dan-proses-nu-kembali-ke-khittah-pada-muktamar-situbondo-1984/> diakses pada 13 Agustus 2022)

¹¹ Dualisme ini lahir setelah insiden 2 Mei 1982 pasca pencabutan kembali surat pengunduran diri KH. Idham Kholid pada tanggal 14 Mei 1982. (Nur Khalik Ridwan, 2016: 262).

¹² Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hlm. 295

Setelah berakhirnya Era Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto berhasil membuka kembali ruang bagi elit politik lokal termasuk partai-partai islam dalam kontestasi politik. Dalam hal ini reformasi membawa perubahan drastis terhadap Sistem Politik Negara Indonesia, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.¹³ Outputnya adalah masyarakat dapat mengenal lebih dekat calon pemimpin daerahnya. Di sisi lain, momentum yang digelar setiap lima tahun sekali ini menjadi ajang bagi elit lokal untuk menunjukkan eksistensinya dalam politik elektoral. Melalui pengaruh dan kekuasaannya elit lokal atau dalam penulisan ini kiai mampu mempengaruhi perolehan suara kandidat tertentu.

Demokrasi membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam konteks pemilihan kepala daerah tak terkecuali sosok kiai. Urusan politik tak lepas dari sosoknya yang lebih banyak dikenal sebagai individu yang religius. Kendati demikian, politik juga sudah diterapkan oleh Islam pada masa-masa penyebarannya hingga sekarang. Oleh karena itu, kiai pun mengamini keikutsertaan terhadap politik. Dalam hal ini pemilihan selalu melibatkan perhitungan suara sehingga kiai memiliki keunggulan tersebut. Kiai memainkan perannya dalam rangka membangun relasi dengan kekuatan politik lokal.

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya ikatan patron klien juga berfungsi sebagai mesin politik. Menjelang pemilihan, umumnya masyarakat cukup hangat membicarakan pilihan kiai, sedangkan para pengikutnya pun ikut meramaikan dengan cara turun langsung mengkampanyekan pasangan calon. Loyalitas pengikut terhadap kiai memperlihatkan adanya hubungan yang secara kontinyu terus dipertahankan. Kiai menyalurkan sumber dayanya berupa sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan santri di pesantren. Selain itu, kiai membentuk mental dan spiritual melalui pengetahuannya sehingga menciptakan kedekatan emosional tertentu. Hal ini juga menandakan bahwa peranan kiai dinilai jauh lebih besar, sedangkan posisi santri berada di bawah kiai. Misalnya Ikatan

¹³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2012)

Santri & Alumni Salafiyah Syafi'iyah (IKSASS) yang merupakan organisasi di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.

Adapun alumni pondok pesantren juga menduduki posisi strategis tertentu sehingga menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan kiai. Misalnya Ibu Zeiniye yang merupakan Ketua Partai PPP DPC Situbondo. Hal inilah yang kemudian memperkuat relasi kuasa kiai di Situbondo. Ikatan patron-klien menjelma sebagai mesin politik yang dapat mempengaruhi elektabilitas kandidat. Terlihat bahwa kekuatan utama kiai terletak pada mekanisme untuk mendulang suara melalui hubungan patron-klien dan ditambah dengan adanya nilai Tradisionalisme Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Situbondo.

Dalam rangka menjaga hubungan ini kiai mendayagunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk memelihara relasinya dengan kekuatan politik lokal. Melalui kekuatan politik inilah kandidat bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Di samping itu, Situbondo juga mempunyai banyak komunitas sholawat di tiap-tiap wilayah. Hal inilah yang kemudian membuat kandidat datang ke kiai untuk memperoleh dukungan agar elektabilitasnya meningkat. Sementara kiai juga akan menerima manfaat berupa paket kebijakan tertentu yang berguna bagi keberlangsungan ikatan patron-klien. Kemampuan memobilisasi massa melalui ikatan tersebut nyatanya sangat efektif digunakan dalam kontestasi politik di Situbondo.

Penelitian terdahulu menyebutkan adanya ikatan patron klien yang berfungsi untuk memobilisasi massa dalam kemenangan Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah 2015.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian tersebut menemukan bahwa *local strongmen* berperan sebagai patron dengan sumber daya yang dimiliki sehingga mempengaruhi perolehan suara dari pasangan Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa. Selain terhadap kemenangan Pilkada 2015 di Mamuju Tengah, terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan

¹⁴ Zainal & Khaldun, *Local Strongmen dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah 2015* dalam Jurnal Sulesana, Vol 11. (2017), hlm. 47-53.

patron klien digunakan untuk memobilisasi pemilih agar memilih kotak kosong¹⁵. Hasil temuan tersebut mengungkapkan bahwa Denny Pomanto berperan sebagai patron yang berhasil menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga memperbesar pengaruhnya untuk memobilisasi massa agar memilih kotak kosong. Denny membangun relasinya melalui pendekatan yang memberi manfaat serta dapat menyelesaikan masalah di masyarakat. Oleh karena itu, timbul rasa balas jasa untuk memenuhi permintaannya dari orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Denny tersebut.

Sementara itu, keterbaruan dalam penelitian ini adalah mengamati proses bagaimana politik patronase terbentuk sehingga dapat mempengaruhi kemenangan Karna-Khoirani di Situbondo. Adapun berdasarkan fenomena yang ada memperlihatkan bahwa dukungan dari kiai di pesantren Salafiyah Syafi'iyah menjadi salah satu faktor kemenangan pasangan Karna-Khoirani melawan *incumbent* Mulya-Abadi. Dalam hal ini suara yang diraih oleh paslon petahana adalah 47% sementara Karna-Khoirani mendapatkan 53% jumlah suara. Selain tim sukses dari kandidat, kiai juga mempunyai tim suksesnya sendiri yang berasal dari suatu hubungan yang telah dibangun sejak lama. Hal ini bertujuan untuk menghimpun kekuatan agar mengoptimalkan seluruh jaringan yang ada.

Di Indonesia, memperlihatkan bahwa peran politik patronase dalam pemilihan dapat membantu kandidat untuk memperoleh dukungan dan suara.¹⁶ Politik patronase tersebut merupakan bagian dari klientelisme yang mengarah pada pemilih tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Stokes bahwa partai mengetahui para pemilih dan sanak familinya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.¹⁷ Dalam hal ini, fenomena di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya kekuatan patronase

¹⁵ Amelia, *Mobilisasi Dukungan pada Pilkada Serentak 2018: Perbandingan Kemenangan dan Kekalahan Kolom Kosong di Kota Makassar dan Kota Tangerang* dalam Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, Vol 2. (2020), hlm. 105.

¹⁶ Edward Aspinall, *When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia* dalam Jurnal Critical Asian Studies, Vol. 46, No. 4 (2014).

¹⁷ Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics* (Cambridge Studies in Comparative Politics). Cambridge: Cambridge University Press

yang diperankan oleh kiai untuk mendulang suara kandidat berdasarkan status dan kemampuannya.

Oleh sebab itu, penelitian ini lebih lanjut mendeskripsikan tentang kekuatan patronase politik serta mengeksplorasi bagaimana kekuatan tersebut masih eksis hingga saat ini. Penulis menggunakan teori patron klien untuk mengetahui sejauh mana relasi kuasa kiai dengan kekuatan politik lokal dalam rangka mempengaruhi elektabilitas pasangan Karna dan Khoirani pada pada pilkada 2020 Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah penulisan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi kuasa kiai dengan kekuatan politik lokal dalam mempengaruhi elektabilitas pasangan Karna-Khoirani pada Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana kualitas hubungan resiprokal terhadap relasi kuasa kiai pasca kemenangan Karna-Khoirani pada kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan tentang relasi kuasa kiai dalam hal mempengaruhi elektabilitas pasangan Karna-Khoirani pada Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo
2. Untuk mendeskripsikan mengenai hubungan resiprokal yang terdapat dalam relasi kuasa kiai pasca kemenangan Karna-Khoirani pada pada pilkada 2020 Kabupaten Situbondo

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penulisan ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu politik khususnya memberikan pemahaman terhadap kekuatan politik lokal dalam mempertahankan eksistensinya ditengah arus demokrasi. Lebih dari itu, penulisan ini secara tidak langsung juga membahas mengenai cara kerja kekuasaan dalam

relasi patron-klien sehingga dapat berpengaruh terhadap perolehan suara kandidat dalam politik elektoral.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi elit lokal mengenai strategi mempertahankan hubungan dengan masyarakat melalui ikatan patron klien. Selain itu, bagi masyarakat umum penulisan dapat memperluas wawasan dalam memahami dinamika relasi kuasa kiai dengan kekuatan politik lokal.

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Kekuasaan

Pada hakikatnya kekuasaan itu melekat dalam diri setiap individu – bahkan seseorang berkuasa atas dirinya sendiri. Kekuasaan adalah kata benda yang bisa menjadi subjek ataupun objek sehingga kekuasaan selalu bisa dimiliki. Akan tetapi, setiap orang mempunyai kadar atau tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini kekuasaan yang lebih dominan mampu membuat orang lain untuk cenderung mengikuti kehendak daripada pemegang kekuasaan yang lebih tinggi.

Mengutip definisi klasik kekuasaan menurut Laswell dan Kaplan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam suatu hubungan kekuasaan (*power relationship*) selalu ada satu atau pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, hubungan ini bersifat asimetris atau tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan ketergantungan, semakin besar ketidakseimbangan tersebut maka semakin besar pula sifat ketergantungannya.

Dalam hal ini kekuasaan selalu menghadirkan ketimpangan yang merupakan konsekuensi dari determinasi atribut. Atribut ini melekat dalam diri setiap subjek sebagai akibat dari dinamika sosial politik di masyarakat. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa atribut menjadi sebuah identitas yang dapat

¹⁸ Harold laswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, hlm. 74.

diperoleh melalui sumber-sumber kekuasaan. Adapun sumber kekuasaan yang dimaksud dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Terlebih kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan umumnya dimiliki oleh tokoh masyarakat yang dianggap sebagai pemimpin sehingga kehadirannya perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan.

Sementara itu cara untuk menyelenggarakan kekuasaan menurut Budiardjo terdapat tiga bentuk, antara lain: melalui kekerasan fisik (*force*); koersi (*coercion*) berupa ancaman akan diadakan sanksi; dan persuasi (*persuasion*) berarti proses meyakinkan atau membujuk.¹⁹ Dari ketiga metode tersebut berguna dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan yang diinginkan tergantung dari situasi yang sedang berlangsung. Kekuasaan juga menghadirkan sanksi sebagai bentuk pendisiplinan terhadap orang lain. Sebaliknya kekuasaan bisa memberi ganjaran (*reward*) atau insentif, imbalan atau kompensasi apabila dirasa melalui sanksi justru tidak efektif bahkan menimbulkan kekacauan. Seperti halnya Parsons menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban tersebut adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melakukan pemaksaan itu.²⁰ Dengan demikian Parsons mengizinkan berbagai metode untuk menyelenggarakan kekuasaan, namun tetap memprioritaskan kepentingan kolektif.

Sebagai sebuah konsep, maka kekuasaan tidak semata-mata bersifat universal, tetapi kekuasaan mempunyai batasan tertentu tentang sejauh mana kekuasaan bisa dikendalikan. Dalam hal ini terdapat dua istilah untuk memperjelas kontrol atas kekuasaan yaitu *scope of power* dan *domain of power*. Cakupan kekuasaan (*scope of power*) merujuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan, sementara wilayah kekuasaan (*domain of power*) merujuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 61.

²⁰ Ibid, hlm. 63

yang terkena kekuasaan.²¹ Oleh karena itu, kekuasaan secara organik akan membentuk suatu susunan hirarkis yang mengendalikan objek-objek yang dikuasai dengan memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan kolektif.

1.5.2 Pengaruh

Pengaruh adalah suatu potensi yang terdapat dalam individu atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Senada dengan Dahl dalam tulisannya yang menyatakan bahwa A memiliki mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.²² Hal ini berarti pengaruh merupakan konsep umum yang mendasari sebuah tindakan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan bahkan kekuasaan pada hakikatnya memiliki esensi untuk memberikan pengaruh. Semakin besar kekuasaan, maka pengaruhnya juga semakin terasa. Demikian pula, potensi pengaruh yang besar juga akan memberikan dampak yang kuat terhadap berlangsungnya kekuasaan.

Sebagaimana perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh menurut Laswell dan Kaplan yang mengemukakan bahwa kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat (yang benar-benar akan dilaksanakan atau yang berupa ancaman sanksi) itulah yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh; ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud.²³ Secara jelas berdasarkan determinasi tersebut Laswell dan Kaplan mengartikan bahwa kekuasaan merupakan salah satu alat untuk memberikan pengaruh baik melalui sanksi atau penghargaan agar kebijakan dapat dipatuhi oleh individu atau kelompok. Meskipun kekuasaan lebih efektif untuk memberikan pengaruh, namun melalui pengaruh juga kekuasaan itu dapat terbentuk atau tergantikan karena pengaruh dapat mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati sehingga sering kali berhasil.

²¹ Ibid, hlm. 62

²² Ibid, hlm. 67

²³ Laswell dan Kaplan, *Power and Society*, hlm. 76.

1.5.3 Elit

Terminologi elit dalam perspektif Haryanto merujuk pada sejumlah kecil orang yang mempunyai keunggulan tertentu yang melekat dalam dirinya sehingga dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat sekitar.²⁴ Dalam pemikiran politik munculnya elit tersebut karena distribusi kekuasaan yang tidak merata. Sedangkan menurut Laswell, elit adalah individu yang mempunyai nilai tertinggi dalam masyarakat serta terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan. Berbeda dengan Laswell, Milss cenderung melihat peran elit dalam suatu kebijakan karena kedudukannya yang berada dalam sebuah institusi. Sementara Putnam, membagi elit menjadi dua kategori. Pertama, elit yang mempunyai pengaruh langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan elit yang pengaruhnya tidak langsung dalam proses perumusan kebijakan.²⁵

Dengan munculnya berbagai definisi terkait elit, namun secara esensial konsep elit bertepatan dengan suatu kelompok yang menduduki posisi strategis yang dapat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Keunggulan elit atas massa tersebut bergantung pada keberhasilan mereka untuk memanipulasi atau mendorong dengan simbol-simbol, kebaikan, dan juga tindakan tertentu.

1.5.3 Kiai

Kiai merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam. Menurut Patoni, masyarakat memberikan gelar kiai kepada seseorang yang menjadi pemimpin atau memiliki pondok pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya.²⁶ Gelar tersebut melekat terkait dengan posisinya sebagai figur yang terhormat di mata masyarakat. Oleh sebab itu, ada pula yang menyebut kiai sebagai “Ki” bukan semata-mata penghormatan, tetapi mempunyai makna pengakuan. Pemberian gelar tersebut juga bukan karena permintaan, namun timbul secara alami berdasarkan keikhlasan pandangan masyarakat umumnya.

²⁴ Haryanto, *Elit, Massa dan Kekuasaan: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Polgov, 2017)

²⁵ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)

²⁶ Achmad Patoni, *Kiai Pesantren dan Dialektika Politik Kekuasaan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019)

Terdapat berbagai macam definisi yang melekat dalam diri kiai. Seperti Greg Fealy yang mendefinisikan kiai sebagai orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam dan mampu mengimplimentasikannya. Selain itu, Dhoffer menekankan kepemilikan pesantren bagi seseorang yang menyandang gelar kiai. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kiai memiliki pengertian plural, yaitu sebagai 'alim ulama dan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan ghaib.

Terlepas dari itu semua, terdapat benang merah sama untuk mendefinisikan kiai. Pemberian gelar kiai tidak serta merta melalui proses yang singkat, namun memerlukan konsistensi terhadap perilaku, pemahaman keagamaan, dan kestabilan pada akhlak al karimah atau moral. Maka dari itu, proses panjang tersebut bermuara pada pengakuan secara tulus dari masyarakat. Bukan karena permintaan atau prestasi akademik, melainkan diberikan langsung oleh masyarakat terkait pengetahuan dan perilaku kesehariannya yang dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam yang diyakini.

1.5.4 Relasi Kuasa

Relasi adalah hubungan atau pertalian antar individu atau kelompok yang saling timbal balik. Sementara relasi kuasa merupakan suatu hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan kepentingan atau tujuan tertentu. Relasi kuasa umumnya hadir atau dikonstruksi oleh pihak yang berwenang atau otoritas terkait yang mana memiliki tujuan untuk mewujudkan keinginannya dengan melibatkan kelompok-kelompok terkait. Adanya keterlibatan kelompok lain inilah yang menyebabkan dinamika dalam sebuah proses perumusan kebijakan atau mekanisme pembuatan keputusan sehingga wajar apabila terjadi dukungan dan perbedaan dalam proses perencanaannya. Oleh karena itu, relasi kuasa memberi kesempatan bagi adanya peran kekuasaan (*power*) untuk menyampaikan aspirasinya kepada aktor pemegang kekuasaan.

Relasi kuasa itu tercipta karena adanya kesepakatan bersama-sama – yang saling mengikat satu sama lain – untuk mewujudkan suatu sistem dalam sebuah institusi baik formal maupun non-formal dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena suatu sistem inilah, maka terdapat aktor-

aktor yang dikenai dan ada pula yang tidak dikenai yang tentunya berada di luar sistem terhadap efek yang ditimbulkan daripada sebuah keputusan atau kebijakan dari pemegang otoritas tertinggi.

Dalam suatu sistem sosial yang lebih besar, maka relasi kuasa menjadi semakin kompleks karena antara institusi satu dan lainnya saling bertautan sehingga banyak aktor yang bermain di dalamnya atau sederhananya banyak pintu yang musti dilewati. Contohnya untuk merealisasikan suatu peraturan perundang-undangan membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam konteks penulisan ini, keputusan kiai untuk mendukung calon kepala daerah tertentu secara otomatis akan mempengaruhi keputusan para pengikutnya. Hal ini menandakan bahwa adanya relasi kuasa yang terjadi ketika kiai tersebut memutuskan keputusannya dikarenakan reaksi timbal balik dari hubungan yang terjalin secara terus menerus.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan presentase keberhasilan daripada tujuan pemangku kekuasaan, maka ada dua hal mendasar untuk mengimplementasikan kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan yang hadir dalam bentuk dominasi, yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (*power over*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui mobilisasi sumberdaya. Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas sehingga memiliki keresmian dan legitimasi untuk mendesakkan keinginan orang lain. *Kedua*, kekuasaan yang hadir dalam bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan terhadap (*power to*) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang sebagai wujud otonomi masyarakat, melalui proses intersubjektif yang mampu menciptakan solidaritas bersama.

1.5.5 Patron

Patron adalah salah satu peran dalam suatu hubungan pertukaran yang beroperasi melalui sumber dayanya sendiri sehingga dapat melakukan perintah atau mengontrolnya secara langsung. Berdasarkan definisi tersebut cukup sulit membedakan antara patron, broker, kelas menengah dan bos. Akan tetapi, hal ini dapat diamati melalui mekanisme hubungan pertukaran itu terjadi. Sebagai contoh

seorang kelas menengah yang berfungsi sebagai pihak agen tidak memiliki kuasa untuk mengontrol apa yang menjadi miliknya.

Patron itu memiliki sentuhan yang bersifat personal dalam arti sentuhan tersebut menyimpan suatu nilai. Hal ini menurut Scott dapat dilakukan melalui pemberian hadiah dari sumber daya yang dimiliki kepada seseorang sehingga menciptakan perasaan untuk melakukan balas budi atau mengikuti kewajiban sesuai kehendak patron.²⁷ Oleh karena itu, kebaikan patron merepresentasikan kesuksesannya untuk memunculkan rasa kewajiban pribadi yang akan mengikat bawahannya kepada patron sebagai klien.

Ikatan patron-klien pada umumnya memiliki kecenderungan untuk saling tumpang tindih apabila dihadapkan pada suatu peran. Dalam hal ini apabila patron mengontrol sumber daya yang dimiliki, namun disisi lain harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih tinggi seperti partai politik, maka patron harus melayaninya dengan sebagai broker. Akan tetapi, apabila partai politik hanya memberikan kontrol langsung kepada patron atas program dan daerah, dengan demikian meningkatkan sumber dayanya untuk menjadi patron dalam skala yang lebih besar dan menghilangkan kebutuhan sebagai broker.

Perbedaan selanjutnya mengenai patron dan kepala atau seorang bos, yaitu dari kekuatannya. Menurut Scott, seorang bos cenderung menggunakan kekuatannya pada bujukan dan sanksi, sementara patron lebih kepada perhatian atau statusnya.²⁸ Lebih lanjut, determinasi tersebut dapat dilihat dari kepemimpinannya yang identik dengan status dan kasih sayang sehingga membedakan dari orang lain pada umumnya, sementara seorang bos cenderung memimpin secara *par excellence* yang bergantung pada ancaman atau sanksi dan bujukan dalam situasi sekuler. Sebagaimana Scott menjelaskan bahwa wilayah agraris dikenal dengan status hirarki yang identik dengan kepemimpinan patron, sedangkan lingkungan egaliter identik dengan para bos atau kepala.²⁹ Hal ini sesuai dengan keadaan dimana patron

²⁷ James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia", Jurnal The American Political Science Review, Vol. 66, No. 1 (1972), hlm. 95-96.

²⁸ Ibid, hlm. 96.

²⁹ Ibid.

lebih menjaga citranya di hadapan masyarakat melalui cinta kasih untuk mempertahankan *status quo*.

1.5.6 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pilkada merupakan proses pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakilnya yang dipilih langsung oleh rakyat selama lima tahun sekali di kabupaten/kota di Indonesia. Lembaga yang berhak menyelenggarakan Pilkada adalah KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang bertanggungjawab kepada DPRD dan secara langsung terhadap KPU Pusat. KPUD memiliki tugas dan wewenang terkait pelaksanaan teknis seperti penyelenggaraan pemilihan, tata cara pemilihan, penetapan calon kepala dan wakil kepala daerah dan lain sebagainya.

1.5.7 Kekuatan Politik

Kekuatan politik adalah suatu usaha dalam proses tawar-menawar dengan mengerahkan sumber-sumber kekuasaan secara maksimal serta memilih saluran yang tepat untuk mewujudkan kepentingan atau aspirasi. Kekuatan politik terbagi menjadi dua yaitu kekuatan yang bersifat formal dan non-formal. Kekuatan politik formal mengambil bentuk ke dalam partai-partai politik, sedangkan kekuatan politik non-formal berkaitan dengan bagian dari masyarakat sipil.³⁰

Pemahaman ini kemudian melahirkan sebuah kekuatan politik yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang berhubungan dengan proses keputusan politik. Seperti Militer, LSM, Partai Politik, Organisasi Buruh, Golongan Intelektual, Pers dan Media Massa, Mahasiswa, Pemuka Agama, Pengusaha, Lembaga Survey, dan Birokrasi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Patron Klien

Konsep patron klien di bidang politik berusaha mengaitkan politik lokal dengan sistem politik yang lebih tinggi atau modern melalui pemikiran cara kerja

³⁰ P. Anthonius Sitepu, *Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Studi Teori Kelompok dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia* dalam Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol. 3 No. 3. (2004), hlm. 164.

relasi patron klien. Keith Legg mendefinisikan patron klien sebagai sebuah hubungan yang selalu identik dengan timbal balik atau resiprokal baik itu antar individu atau individu dan kelompok.³¹

Adapun James Scott menjelaskan bahwa patron klien adalah pertukaran hubungan antar peran dimana patron sebagai aktor yang memiliki status sumber daya sosial-ekonomi lebih tinggi untuk memberikan pengaruhnya melalui manfaat atau perlindungan kepada aktor yang lebih rendah (klien).³² Kedua definisi tersebut ekuivalen dalam hal sebuah hubungan yang terjalin karena adanya pertukaran manfaat antara patron dan klien.

Dalam analisis selanjutnya, Scott mengemukakan bahwa terdapat dua jenis model dalam ikatan patron-klien.³³ Pertama, hubungan secara langsung antara patron dan klien – Scott menyebut sebagai kluster patron-klien. Relasi ini merupakan pengaruh langsung terhadap seorang subjek yang bersangkutan tanpa sebuah perantara tertentu ataupun pengaruh dari patron yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang kiai yang menyampaikan narasi tertentu dalam memilih kandidat kepada para santrinya.

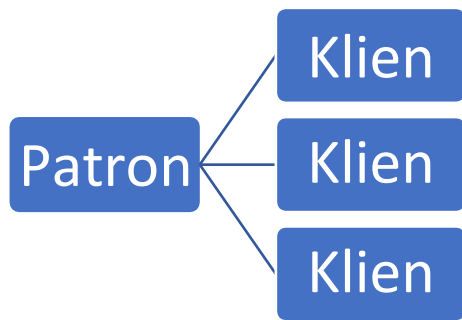
Kedua, piramida patron klien yang merupakan hubungan antar kluster patron-klien secara hirarkis. Maksudnya adalah untuk menjangkau masyarakat yang berada di luar pengaruhnya, maka seorang patron yang dominan akan menjalin hubungan dengan patron lain yang terhubung secara langsung dengan klien untuk tujuan tertentu.

Dalam praktiknya kiai menjalin hubungan dengan tuan tanah yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat khususnya para pekerja secara langsung. Hal ini menandakan suatu usaha untuk memperluas pengaruh terutama pada saat politik elektoral berlangsung. Berikut adalah struktur hirarkis yang menggambarkan piramida patron klien dan patron klien klaster.

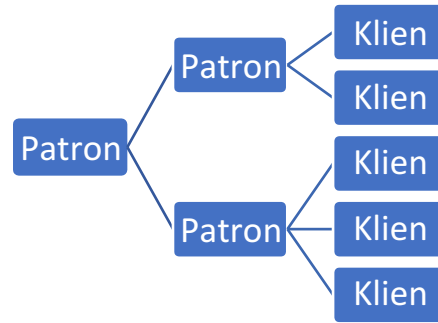
³¹ Keith R. Legg, *Tuan, Hamba dan Politisi* (Jakarta: Sinar Agape Press, 1983)

³² James C. Scott, Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia dalam *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (1972)

³³ Ibid, hlm. 96



Gambar 1. 2 Hirarki Patron Klien Piramid



Gambar 1. 1 Hirarki Patron Klien Klaster

Selanjutnya terdapat tiga syarat terjadinya ikatan patron klien, antara lain:

1. Ketimpangan sumber daya.

Ketimpangan sumber daya menurut Keith Legg disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelangkaan barang dan jasa, keamanan, dan jaminan berupa perlindungan. Faktor tersebut membuktikan bahwa persepsi orang tentang kelangkaan dan ketidakamanan dapat mendorong orang untuk mendapatkan bantuan dari ikatan hubungan patron klien atau bentuk-bentuk bantuan yang lain.

Akan tetapi, meskipun klien menginginkan bantuan dari patron, namun hal ini tidak secara pasti bisa berhasil mewujudkan ikatan patron klien. Bila hubungan tersebut berasal dari calon klien, maka perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesediaan klien untuk menerima seseorang sebagai patronnya. Oleh karena itu, Keith Legg meneruskan penjelasannya bahwa motivasi utama terjalannya relasi patron klien karena adanya prakarsa dari seorang patron untuk memperoleh status dan kekuasaan yang berguna sebagai “lumbung nilai” dalam bentuk dukungan, perhatian, pelayanan atau lainnya yang dapat diambil sewaktu-waktu.

2. Hubungan tatap muka

Hubungan tatap muka merupakan strategi untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan patron-klien sehingga menciptakan rasa kepercayaan serta kasih sayang antara keduanya daripada sebelumnya. Lebih lanjut, menurut Scott adanya ekspektasi untuk saling mempererat hubungan tersebut selain

dilandasi oleh keinginan berbalas saja, juga didukung oleh suatu nilai dalam komunitas dan tradisi yang ada.³⁴

Dalam banyak konteks, ikatan patron-klien umumnya dinyatakan dalam istilah mitra atau rekan, namun hal ini hanya tampak di permukaan karena yang sesungguhnya ditujukan kepada kerabat dekat. Tradisi untuk memilih kerabat dekat merupakan suatu cara membangun ikatan dan loyalitas yang kuat sehingga antara patron dan klien dapat memperoleh manfaat serta keuntungan satu sama lain. Kualitas hubungan tatap muka dipengaruhi oleh ukuran basis sumber daya dan batas dari kemampuan patron untuk memiliki klien. Akan tetapi, meskipun sumber dayanya luas, hubungan pribadi dan kekerabatan yang dibangun di dalamnya tidak dapat menjamin bahwa klien dapat melebihi kapasitas patron. Dalam hal ini Scott mengemukakan bahwa umumnya klien yang terhubung langsung dengan patron terdapat sekitar 20-30 klien, sementara jumlah pengikutnya dapat melebihi dari seratus orang.

3. Fleksibilitas pembauran atau hubungan secara implisit

Dalam hal ini merupakan kontrak-impersonal (kontrak yang tidak bersifat pribadi). Faktor yang merefleksikan fleksibilitas pembauran tersebut bisa terjadi karena adanya hubungan kekerabatan, pengalaman masa lalu, tradisi yang sama, dan pengenalan melalui keluarga klien. Oleh karena itu, Mayer menyebut hubungan ini sebagai hubungan kuat “multiplex”³⁵ sehingga memungkinkan ekspansi atau perluasan pertukaran yang potensial. Dalam hal ini patron juga bisa meminta bantuan klien untuk mempersiapkan kemenangan dalam pemilihan, kampanye, atau mencari tahu mengenai saingan dari patron lainnya. Sebaliknya klien dapat mendekati patron dengan meminta bantuan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan makanan atau lebih jauh meminta patron supaya dapat mengisi pemerintahan.

³⁴ Ibid.

³⁵ Relasi multiplex adalah seperti balas budi. Jadi orang yang memiliki lahan menyewakan kepada salah satu kerabat yang dahulu pernah membantunya atau kerabat terdekat dari kerabatnya sendiri (Scott)

Oleh karena itu, hubungan ini sifatnya fleksibel jika dihadapkan pada situasi tertentu sesuai keperluan, karena adanya pertukaran alami tersebut sepanjang waktu, maka relasi juga kian meluas. Tidak seperti hubungan kontrak secara resmi – yang hanya bertahan sementara waktu. Ikatan patron-klien dapat melewati berbagai dinamika perubahan sosial sepanjang waktu karena kemampuannya untuk bertahan melalui pemberian satu sama lain. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan utama yakni manfaat yang lebih besar dari ketidaksetaraan tersebut melalui ikatan patron-klien.

1.7 Metode Penulisan

1.7.1 Fokus Penulisan

Fokus penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang kekuatan patronase politik di dalam relasi kuasa kiai berdasarkan teori ikatan patron-klien untuk memenangkan kandidat. Adapun metode dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Sebagaimana penulisan kualitatif membantu untuk menjelaskan makna dari sebuah fenomena sosial. Sementara untuk memperoleh data, penulis menerapkan metode penulisan melalui wawancara mendalam kepada narasumber.

1.7.2 Tipe Penulisan

Penulisan ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan tentang kekuatan politik patronase melalui ikatan patron klien terhadap relasi kuasa kiai dengan kekuatan politik lokal dalam rangka meningkatkan perolehan suara kandidat. Lebih lanjut, melalui kacamata ikatan patron-klien nantinya penulisan ini akan mengkaji tentang ketimpangan kekuasaan, kualitas hubungan patron dan klien, serta fleksibilitas atau keluwesan pembauran. Dalam hal ini penulisan yang bersifat deskriptif akan menjelaskan secara detil relasi kuasa kiai termasuk hubungannya pasca pemilihan kepala daerah 2020 Situbondo.

1.7.3 Subjek Penelitian

Penulisan ini memilih informan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan yang dimaksud memenuhi kebutuhan dalam penulisan ini. Proses penentuan ini akan menentukan hasil penulisan secara keseluruhan sehingga perlu untuk memilih informan sesuai dengan kriteria terkait permasalahan penulisan. Adapun profil subjek dalam penelitian seperti tertera pada halaman selanjutnya.

No.	Nama	Profil
1.	KH. Afifudin Muhajir	Wakil Pengasuh PP. Salafiyah Syafi'iyah
2.	Ibu Zeiniye	Ketua DPC Partai PPP Situbondo
3.	Cak Nawawi	Anggota Partai PPP
4.	Ustad Aburowi	Ketua IKSASS Rayon Situbondo
5.	Haji Samsul	Kepala Desa Banyuputih
6.	Mas Kifli	Alumni PP. Salafiyah Syafi'iyah
7.	Pak Totok	Buruh tani dan Jemaah Sholawat Bening

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis sumber. *Pertama*, berasal dari wawancara secara langsung penulis kepada narasumber yang disebut sebagai data primer. Dalam hal ini penulis telah membuat pedoman wawancara agar menghasilkan temuan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian supaya terstruktur dan sistematis. Selain itu, beberapa narasumber memerlukan perlakuan khusus seperti menggunakan bahasa daerah setempat untuk membangun rasa kepercayaan dan juga kenyamanan ketika wawancara dimulai. Hasil wawancara berupa rekaman audio dan transkrip percakapan antara penulis dan narasumber. Adapun untuk memperkuat hasil penelitian, maka penulis melakukan pengamatan dan dokumentasi yang tampak di lapangan agar memperkuat bukti penelitian.

Data primer ini merupakan pengalaman empirik penulis sehingga untuk memperkuat temuan, maka penulis juga mengumpulkan data yang berasal dari sumber sekunder. Sumber sekunder ini berfungsi untuk menunjang temuan serta validitas dari sebuah penelitian terhadap fenomena atau gambaran secara umum dari objek yang diteliti. Penulis mengambil data sekunder dari buku dan literatur terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang cukup, penulis melakukan analisis terhadap temuan yang diperoleh. Analisis tersebut merupakan elaborasi antara hasil wawancara dari berbagai narasumber serta tinjauan literatur terkait dalam rangka menyusun hasil pembahasan. Hal ini juga berkaitan dengan cara mengintegrasikan dan menghubungkan pola tertentu sesuai interpretasi penulis dalam bentuk detail. Adapun untuk metode deduktif sebagai cara untuk menganalisis temuan di lapangan.